



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 79**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN BALUBUR
LIMBANGAN TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumuan rancangan akhir Renja. Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Renja SKPD/Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya, bahwa Renja Kecamatan Kadugora Tahun 2023 merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan Perangkat Daerah akan tetapi dapat terlihat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*Achievable*) dan tepat waktu (*time bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic covid-19. Seperti yang kita ketahui penyebaran covid-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia dan hingga saat ini masih terdapat tanda – tanda penyebarannya.

Pandemi Covid-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bias lepas dari tekanan Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, penyediaan jarring pengaman social dan penanggulangan pandemic covid-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemo Covid-19 telah banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus dimasa depan. Masa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian tapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan pada Pembangunan Daerah tahun 2023, yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam transaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi berjalan optimal serta pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang

strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif)

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan**

Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023.

sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balubur Limbangan tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Balubur Limbangan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Balubur Limbangan;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.1 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Balubur Limbangan sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan KegiatanPrioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Balubur Limbangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balubur Limbangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Balubur Limbangan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balubur Limbangan 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 Pada Perangkat Daerah Kecamatan Balubur Limbangan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 14 Kegiatan terdapat 13 (tiga belas) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (89,40%), diantaranya :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,37%)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan (99,37%)

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (87,30%)
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (87,25%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD (98,82%)
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian (98%)
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (98%)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum (97,60%)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,66%)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (85,24%)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,44%)
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (89,91%)
 - Fasilitas Kunjungan Tamu (99,92%)
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(99,85%)
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (99,92%)
- 6) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (97,38%)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (94,42%)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (93,46%)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan (93,46%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , diantaranya:

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,34%)
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,34%)
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (99,91%)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (99,91%)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program PemberdayaanMasyarakat Desa dan kelurahan (96,43 %), diantaranya:

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (96,43%).
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (96,43%).

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban (99,38%), diantaranya:

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (99,38%).
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (99,38%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,018,736,955	1,804,916,485	89,40
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1.1 Penyusunan dokumen perencanaan	8,877,000	8,821,500	99,37
2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah			
	2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1,632,230,119	1,425,093,709	87.30
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian			
	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	14.700.000	98.00
4	Kegiatan Administrasi Umum	18.598.800,	13.019.836	70,00
	4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.300.316	76.045.800	99.66
	4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,444,200	20,836,800	85.24
	4.3 Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	8,009,000	7,964,400	99,44
	4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,420,600	5,361,600	89,91
	4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,440,000	15,428,000	99,92

5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151,940,400	151,726,000	99,85
6		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,232,320	8,717,476	97,38
7.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dn pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,800,000	23,178,200	93,46
B		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan			
	1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	192,240,800	182,921,400	97,34
	1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	164,426,460	164,282,600	99,91
C.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	1.1	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	15,730,100	15,170,100	96,43
D.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1		Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	1.1	Sinergitas dengan Kepolisian NKRI, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	78,204,800	77,724,800	99,38

(sumberPengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Balubur Limbangan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 14 Kegiatan terdapat 1 (satu) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100,00%), antara lain:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100 %)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100

(sumberPengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Balubur Limbangan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Balubur Limbangan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Balubur Limbangan tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Balubur Limbangan pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Balubur Limbangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Balubur Limbangan.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

B. Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Oleh karena itu Renstra Kecamatan Balubur Limbangan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Balubur Limbangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.





Adapun capaian Renstra Kecamatan Balubur Limbangan tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Balubur Limbangan
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	76	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	81.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82.13	101.58	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	101.58	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	65	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		B	100.00	

(sumber Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

(sumber Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Balubur Limbangan tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
- Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
- Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 101,58% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 82% pencapaiannya sampai 82, 13%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Balubur Limbangan. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balubur Limbangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel.2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bl.Limbangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Orogram dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7					Urusan Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	100	40,71	40,71	100	100	100,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100	100	5,23	5,23	100	100	100,00

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 Dokumen	2	2	0	0,00	2	4	40,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10 Dokumen	2	2	1	50,00	2	4	40,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	46,28	46,28	100	100	100,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulam	12	12	6	50,00	12	24	40,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100	37,09	37,09	100	100	100,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170 Stel	34	34	34	100,00	34	68	40,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman Pejabat fungsional sesuai bidang keahlian	15 Orang	3	3	0	0,00	3	3	20,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	58,93	58,93	100	100	100,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	55 Item	11	11	3	27,27	11	22	40,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	160 Jenis	32	32	16	50,00	32	64	40,00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga	80 Item	16	16	100,00	100,00	16	32	40,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan	35 Jenis	7	7	4	57,14	7	14	40,00

						kebutuhan								
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 Exemplar	72	72	36	50,00	72	144	40,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan Rapat dan kegiatan lainnya yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	6820 Orang	1364	1364	682	50,00	1364	2728	40,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	2680 OH	536	536	268	50,00	536	1.072	40,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100	4,29	4,29	100	100	100,00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	4	4	0	0,00	4	8	57,14
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	15 Item	3	3	3	100,00	3	6	60,00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memadai	1 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	39,82	39,82	100	100	100,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Air dan Listrik	60 Bulan	12	12	6	50,00	12	24	40,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	40 Item	8	8	3	37,50	8	16	40,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelyanan Umum kantor	60 Bulan	12	12	6	50,00	12	24	40,00

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	30,95	30,95	100	100	100,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan	30 Unit	6	6	4	66,67	6	12	40,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	1	1	-	-	1	2	40,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100 %	100	100	32,59	32,59	100	100	100,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rutin Kecamatan	35 Kegiatan	7	7	4	57,14	7	14	40,00
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100	100	51,76	51,76	100	100	100,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana PATEN yang memadai	25 Item	5	5	3	60,00	5	10	40,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	60,70	60,70	100	100	100,00

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5 Dokumen	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	2	2	2	100,00	2	4	40,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	35,02	35,02	100	100	100,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan trantibum	5 Kegiatan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	5 Kegiatan	1	1	0	0,00	1	2	40,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	50,96	50,96	100	100	100,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00

						Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	45 Kegiatan	9	9	5	55,56	9	18	40,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	42,69	42,69	100	100	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan trantibum	5 Kegiatan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa	40 Desa	8	8	8	100,00	8	16	40,00

(Sumber Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Balubur Limbangan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indek Kepuasan Masyarakat			n/a	75	77	79	80	75	75	100	100	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			n/a	75	77	79	80	75	75	100	100	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			n/a	75	77	79	80	75	75	100	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			n/a	BB	BB	BB	BB	CC	CC	B	B	

(sumber Data Kantor Kecamatan Balubur Limbangan)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balubur Limbangan ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Balubur Limbangan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

wilayah Kecamatan Balubur Limbangan (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Balubur Limbangan sebesar Rp. 3.901.234.000 -. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Balubur Limbangan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Balubur Limbangan mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Balubur Limbangan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN				2,566,036,920	KECAMATAN				2,566,036,920	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,914,375,920	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,914,375,920	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,877,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,877,000	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8,877,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8,877,000	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1,630,758,750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1,630,758,750	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,623,592,150	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,623,592,150	

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7,166,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7,166,600	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	0	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	91,467,425	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	91,467,425	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	5,234,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	5,234,400	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	12,095,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	12,095,400	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	3,546,125	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	3,546,125	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7,177,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7,177,500	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	5,454,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	5,454,000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	15,000,000	

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	42,960,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	42,960,000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	105,020,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	105,020,400	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	30,183,400	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	30,183,400	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	74,837,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	74,837,000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	23,342,345	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	23,342,345	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9,334,095	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9,334,095	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	4,470,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	4,470,000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	9,538,250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	9,538,250	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	39,910,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	39,910,000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dn pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau jabatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 unit	3,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 unit	3,750,000	

7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dn pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	9 unit	36,160,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	9 unit	36,160,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	299,145,100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	299,145,100	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	125,237,100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	125,237,100	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	0	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	12 laporan	125,237,100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	12 laporan	125,237,100	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		173,908,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		173,908,000	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	12	48,906,400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	48,906,400	

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	125,001,600	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	125,001,600	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15,030,100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15,030,100	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	15,030,100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	15,030,100	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	14 Desa	15,030,100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	14 Desa	15,030,100	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	88,031,200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	175,770,300	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	88,031,200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	160,517,500	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	88,031,200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	152,585,400	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	00	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	9,334,095	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15,252,800	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	4,470,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	15,252,800	

					Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	88,031,200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	88,031,200	
7	01	05	2,01		Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	88,031,200	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	88,031,200	
7	01	05	2,01	01	<i>Sinergitas dengn Kepolisian NKRI, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan</i>	Kecamatan Balubur Limbangan	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	88,031,200	<i>Sinergitas dengn Kepolisian NKRI, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan</i>	Kecamatan Balubur Limbangan	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	88,031,200	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	299,145,100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	220,030,700	
7	01	06			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Balubur Limbangan	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100 %	212,246,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Balubur Limbangan	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100 %	212,246,500	
7	01	06	2,01		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah	1 Laporan	212,246,500	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah	1 Laporan	212,246,500	
7	01	06	2,01	06	<i>PelaksanaannTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Kecamatan Balubur Limbangan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	2 Dokumen	200,000,000	<i>PelaksanaannTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Kecamatan Balubur Limbangan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	2 Dokumen	200,000,000	
7	01	06	2,01	12	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Balubur Limbangan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	1 Kegiatan	37,208,100	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Balubur Limbangan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	1 Kegiatan	37,208,100	

7	01	06	2,01	13	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	1 Dokumen	37,208,100	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Kecamatan Balubur Limbangan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	1 Dokumen	37,208,100		
TOTAL									2,566,036,920						2,566,036,920	

(sumber Data Kantor Kecamatan Balubur Limbangan)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Balubur Limbangan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Balubur Limbangan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balubur Limbangan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)
61e7ad4c759f8	19-01-2022	DEDENG AMERUDIN	Kepala Desa Cigagade	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Kurangnya Sarana Peralatan Posyandu	RW.01 S/D RW 10, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eceb1d4dba8	23-01-2022	DEDENG AMERUDIN	Kepala Desa Cigagade	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kader Dasawisma	Kader Dasawisma Desa yang Belum Ada Anggaran Pembinaan	DESA CIGAGADE, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eceba435712	23-01-2022	DEDENG AMERUDIN	Kepala Desa Cigagade	Kesehatan	Pembangunan Pustu	Kondisi Bangunan Pustu Yang Sudah Rusak dan Kumuh	Kedusunan Tiga Desa Cigagade, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : 1. wilayah kerja minimal 1 desa 2. lokasi jauh dari Puskesmas 3. tersedia tanah milik pemerintah/ sertifikat kepemilikan tanah 4. Proposal dilengkapi dengan DED Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ecec45606a5	23-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Sekretariat Daerah	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Kondisi Perumahan Masyarakat Miskin yang Rusak dan Kumuh	RW.01 s/d RW. 10 Desa Cigagade, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Prop. di lengkapi Ktp WNI & sdh berkeluarga, blm punya rumah, KK sesuai dgn domisili tetap, SK domisili Tetap dr Kel/Desa setempat, Penerima kategori Masy pnghasilan rendah, Penrima blm pernah dpat bantuan perbaikan rumah dr prog lain, foto kondisi rumah Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ecf04bbb36b	23-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Kondisi Sarana Peribadatan yang Rusak dan Kumuh	Kp. Tonjong Kulon RT.02/RW.0 2, Kab.Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ecf1957837d	23-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Kurangnya Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Korban PHK	RW.01 S/D RW. 10 Desa Cigagade, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rekomendasi : Harus diverifikasi terlebih dahulu, apakah desa tersebut layak mendapatkan bantuan PKS-PK. Diprioritaskan desa yang belum pernah mendapatkan bantuan PKS-PK dan desa dengan tk. kemiskinan serta pengangguran tinggi dan merupakan desa lokasi fokus stunting Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ecf3663f501	23-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Kesekretarian RT/RW yang Belum Terbangun	RW. 01 S/D RW. 10 DESA CIGAGADE, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap dilengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ecf4c706116	23-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Madrasah	Belum adanya bangunan madrasah di wilayah	KP. TONJONG KULON RT. 01/RW.02 DESA CIGAGADE, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas, bukan dana hibah, namun pembangunan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee0e0b0869d	24-01-2022	DEDENG AMERUD IN	Kepala Desa Cigagade	Pendidikan	Pengadaan APE luar - PAUD	Belum Tersedianya Alat Peraga Dalam dan Luar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kedusunan 1 dan 2 Desa Cigagade, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee2a4b8773f	24-01-2022	DEDENG AMERUDIN	Kepala Desa Cigagade	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Msaih kurangnya sarana peralatan olahraga	KP. Tonjong Rw.02 Desa Cigagade, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Kabupaten /Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eeae12798c8	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan	ke kurangan air bersih ketika musim kemarau datang	kp. cijolang RT 003 RW 002, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil Kec. Setempat 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eeb934eac5b	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Kesehatan	Peningkatan volume pelatihan keamanan pangan bagi UMKM	banyak peserta UMKM gulung tikar	desa cijolang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. Data Permohonan Ijin Industri Rumah Tangga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61eebfca9cfde	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Perpustakaan	Bantuan Buku Bahan Pusataka	kekurangan buku bacaan dan tata kelola perpustakaan desa	kp. pulo rw007, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap dilengkapi dengan proposal, Akte Pendirian, SK Kepengurusan, Ijin Operasional, Ijin Domisili, Ijin Rekomendasi, NPWP an. Lembaga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eec01138698	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	kurangnya alat kesehatan posyandu	seluruh wilayah desa cijolang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eec140c1137	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	banyak UMKM yang gulung tikar karena modalnya tidak kuat	RW 001 sampai RW011, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61eec3901c150	24-01-2022	DEDEN ZENAL MUTAQIN	Kepala Desa Cijolang	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	BANYAK SARANA PRASARANA OLAAHRAGA YANG RUSAK DAN TIDAK LAYAK PAKAI	DESA CIJOLANG, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cijolang	Kabupaten /Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91172ed2fd	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Rabat Beton Jalan Desa Poros Baduyut Gosali	Jl. Desa Kp. Baduyut - Kp. Gosali, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9131952dd9	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Hot Mix Jalan Desa Poros Cianten - Sukamanah Lokasi Urug Cipaku	Jl. Desa Kp. Cianten - Kp. Sukamanah, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi

													anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9164b2439e	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Cipareuan	Kp. Cipeujeuh, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e919e29e0e2	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan	Saluran Air Bersih (Sumur Bor)	Kp. Cianten, Kp. Cipeujeuh, Kp. Gosali, Kp. Sukamanah, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil Kec. Setempat 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPRSetempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9204d0c841	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	TPT Poros Kp. Lebak Jaya - Kp. Bojong	Kp. Lebak Jaya - Kp. Bojong, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi

													anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9224916a15	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	Insentif Guru Ngaji	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap di lengkapi dengan proposal, foto dokumentasi serta daftar nama usulan guru ngaji yang terdaftar di FKDT Kab. garut. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e92587a9fa3	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	penataan lahan parkir di TPU Sunan Rumenggong untuk pejiarah.	Kp. Poronggol, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e926aa76dc0	20-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jembatan Jalan	Pembangunan Jembatan Babakan	Kp. Babakan Rw. 009, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi

													anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea5d7a7f804	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Linmas dengan prioritas pelaksanaandi Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Cikelet	Penambahan InsetifLinmas	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Rekomendasi : sesuai dengan program prioritas dan ketentuannya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea68482ec37	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Pengadaan Perlengkapan Posyandu	Kp. Cianten Rw. 001, Kp. Cipeujeuh Rw. 002, Kp. Gosali, Rw. 003, Kp. Sukamanah Rw. 012, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea68e3da669	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Mebeler Posyandu	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ea694f09b14	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pamsimas wilayah Rw. 009 dan Rw. 010	Kp. Babakan Pataruman Rw. 009 dan Kp. Cidepok Rw. 010, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Dibangun sesuai standar dalam Prog. Pamsimas, dikelola KPSPAMS, lampirkan komitmen desa dlm menyiapkan: sumber air (lampirkan fotonya juga), dampingan anggaran dari APBDes, bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan SR Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea6b93aff47	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pariwisata	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Pembangunan Gafura Batas Desa	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rekomendasi : Lengkapi Surat Usulan; Proposal (Rumusan Permasalahan), SK Yayasan Atau Organisasi serta SK Desa Wisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Rincian Anggaran Biaya nya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea6d525da3e	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan Sarana Olahraga	Kp. Cianten Rw. 001, Kp. Cipeujeuh Rw. 002, Kp. Gosali, Rw. 003, Kp. Sukamanah Rw. 012, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa

													4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea70da12377	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Perbaikan Irigasi Selokan	Kp. Cileunca dan Kp. Manjah Beureum, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea71f9b44bf	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Perbaikan Lapang Volli	Kp. Sukasirna, Kp. Poronggol, Kp. Babakan Pataruman, Kp. Cidepok, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten /Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ea72842c050	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Jalan	Pembangunan Jembatan Cicae	Kp. Babakan Pataruman Rw. 009, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea753329a77	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah Ibadah	Perbaikan Mesjid Jami	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea76a9d7f98	21-01-2022	MARPU NADAR SETIABUDI	Kepala Desa Ciwangi	Pariwisata	Desa Wisata (Aksesjalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Pembangunan DesaWisata PJC	Desa Ciwangi, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rekomendasi : lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1021c9f5c	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Sekretariat Daerah	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Masih banyaknya Rumah warga di wilayah desa Dunguswiru yang tidak layak huni dan	Jalan Desa Dunguswiru No.01 Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti harap dilengkapi dengan KTP+KK sudah berkeluarga, Belum memiliki rumah/memiliki

						kurang memenuhi standard sanitasi kesehatan							dengan kondisi Tidak Layak Huni, Penerima termasuk kategori MBR, belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1090dcbe7	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang (BUMDes)	Masih belum optimalnya Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa yang diakibatkan dari Mininmya anggaran desa baik kabupaten, Provinsi maupun Pusat sehingga berimbas pada tidak adanya dukungan modal usaha dari APBDesa untuk usaha BUMDesa	Jalan Desa Dunguswiru No.01 Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten /Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti jika proposal sesuai persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ed110a72516	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang (BUMDes)	Masih belum optimalnya Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa yang diakibatkan dari Mininmya anggaran desa baik kabupaten, Provinsi maupun Pusat sehingga berimbas pada tidak adanya dukungan modal usaha dari APBDesa untuk usaha BUMDesa	Jalan Desa Dunguswiru No.01 Dunguswiru Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti jika proposal sesuai persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed15fd5876f	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Masih belum optimalnya Pelayanan Tingkat RW terutama di RW 6, 7, 9 dan 10 dikarenakan belum terbangunnya sekretariat ke-RW an yang diakibatkan dari Mininmya anggaran desa baik kabupaten, Provinsi maupun Pusat sehingga berimbas pada tidak terbangunnya	RW 6, 7, 9 dan 10 Desa Dunguswiru Balubur Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 04

						kantor kesekretariatan RW untuk Pelayanan masyarakat di wilayah tersebut							
61ed16a2458ee	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kader Dasawisma	Masih belum optimalnya Peran Serta Kader Dasawisma dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diakibatkan dari Mininmya anggaran desa baik kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk kader Posyandu dan dasawisma	Sekretariat Posyandu Tingkat RW Desa Dunguswiru Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed17a949efc	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Masih belum optimalnya Kelompok usaha Bersama Kartika Cukanggaleuh, dikarenakan minimnya modal untuk pengembangan usaha di bidang tata boga	Sekretariat KUBE Kartika RW.06 Desa Dunguswiru Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ed183f00e71	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Masih belum optimalnya Kelompokusaha Bersama Harapan Jaya Koang, dikarenakan minimnya modal untuk pengembangan usaha di bidang tata boga	Sekretariat KUBE Harapan Jaya RW.01 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed18d2082cd	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian Linmas dengan prioritas pelaksanaan di Kecamatan Cisompet, Pamulihan, Singajaya, Cikelet, Bungbulang, Mekarmukti, Caringin, Banjarwangi, Peundeuy dan Pakenjeng	Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Desa Dunguswiru, Jalan Desa Dunguswiru No.01, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Rekomendasi : lokasi untuk di kaji dan ditindaklanjuti sesuai persyaratan, anggota linmas tercatat di satpol pp Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
061ed192ce61bc	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Kearsipan	"Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip,	Masih kurangnya sarana prasarana kearsipan desa sebagai penunjang administrasi Desa	Kantor Desa Dunguswiru, Jalan Desa Dunguswiru No.01 Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Rekomendasi Kecamatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

					Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)"								
61ed1993ed2b4	23-01-222	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pembangunan RKB -SD	Terdapat Ruang Kelasrusak berat, sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman di SDN Dunguswiru 1	SDN Dunguswiru1 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed19dba4577	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pembangunan RKB -SD	Terdapat Ruang Kelasrusak berat, sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman SDN Dunguswiru 2	SDN Dunguswiru2 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1a52e57f8	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pembangunan RKB -SD	Terdapat Ruang Kelasrusak berat, sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman di SDN Dunguswiru 3	SDN Dunguswiru3, Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0

													Anggaran : 0
61ed1ac9f3915	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	SDN Dunguswiru 1 infrastruktur penunjang Keamanan di lingkungan Sekolah masih belum optimal sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguswiru 1 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1b3b8aa8b	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Di SDN Dunguswiru 2 infrastruktur penunjang Keamanan di lingkungan Sekolah masih belum optimal sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguswiru 2 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1bbd61d4b	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pembangunan RKB - SD	SDN Dunguswiru 3 infrastruktur penunjang Keamanan di lingkungan Sekolah masih belum optimal sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguswiru 3 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ed1d197044e	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pengadaan Mebeuler -SD	SDN Dunguswiru 1 meubeler Kursi dan meja siswa banyak yang sudah rusak berat sehingga berimbas pada proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguiru 1 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1d7116c0c	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pengadaan Mebeuler -SD	SDN Dunguswiru 2 meubeler Kursi dan meja siswa banyak yang sudah rusak berat sehingga berimbas pada proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguswiru 2 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1dbf86da0	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Pendidikan	Pengadaan Mebeuler -SD	SDN Dunguswiru 3 meubeler Kursi dan meja siswa banyak yang sudah rusak berat sehingga berimbas pada proses belajar mengajar kurang nyaman	SDN Dunguswiru 3 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ed1e1ea2818	23-01-2022	DADANG KUSNADI	Kepala Desa Dunguswiru	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Kurangnya fasilitas / sarana penunjang kegiatan kader posyandu Desa seperti; Bed Pemeriksaan, Alat ukur suhu tubuh, Alat ukur balita, dll	10 Posyandu Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ed1ed0bf6f5	23-01-2022	DADAN G KUSNA DI	Kepala Desa Dunguswi ru	Pangan	Lumbung Pangan	Belum tersedianya bangunan Lumbung Pangan Masyarakat diRW.01, RW.02, RW.03, RW.04, RW.05RW.06, RW.07 RW.09 dan RW.10	RW.01, RW.02, RW.03, RW.04, RW.05 RW.06, RW.07 RW.09 dan RW.10 Desa Dunguswiru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Dunguswiru	Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Lengkapi Dokumen Pendukung (proposals dan Foto lokasi), perjelas luas lahan yang akan dijadikan lumbung, luasan lahan pertanian produktifnya berapa, berapa jumlah masyarakat yang terfasilitasi, Di prioritaskan di daerah yang belum memiliki Lumbung pangan Koefisien : 00 Anggaran : 0
61ea3423cca37	21-01-2022	ADE PURKO N	Kepala Desa Limbangan Barat	Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	mengantisipasi penyalah gunaan obat-obatan terlarang	Kp. Cilolongoka n RT.01 RW.08, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan dan harap dilengkapi dengan proposal, foto dan pendukung lainnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ea362973c12	21-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	sekolah yang belum mempunyai pagar, mengakibatkan masyarakat atau orang luar dengan mudah keluar masuk halaman sekolah	Kp. Cicadas RT.02 RW.03, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea370707fb1	21-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Pendidikan	Pengadaan Mebeuler -PAUD	Tidak adanya komputer/laptop dan printer serta alat penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar.	Kp. Cicadas RT.01 RW.03, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ea3c069d182	21-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Kearsipan	"Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)"	bemum mempunyai sarana prasarana kearsipan yang memadai.	kp. cilolongoka nRT.01 RW.08, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Rekomendasi Kecamatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ea3d1abf14d	21-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	tidak adanya insentif atau gaji bagi guru ngaji	dusun 1, dusun 2, dan dusun 3, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap di lengkapi dengan proposal, foto dokumentasi serta daftar nama usulan guru ngaji yang terdaftar di FKDT Kab.garut Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee3099928e1	24-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	dalam keadaan pandemi covid-19 seperti sekarang, banyak usaha yang terdampak covid-19 sehingga mengalami penurunan hasil usaha, maka diperlukan tambahan modal untuk membantu usaha ekonomi masyarakat.	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee34333614d	24-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	keterampilan dan potensi pengembangan usaha industri makanan (seperti olahan keripik, kopi, plahan makanan lainnnya), serta industri pakaian kurang ditunjang dengan teknologi seperti mesin pengolah kopi, mesin pengolah keripik, dll	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberday aan Masyaraka tdan Desa	Dinas Pemberda yaan Masyaraka tdan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee35b637143	24-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Kesehatan	Pengadaan antropometri set	belum memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan posyandu seperti antropometri	10 Posyanad udi Desa Limbangan Barat, Kab.Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : agar dikaji dan Sesuaikan dengan renja 2023 Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee38622805b	24-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	belum tersedianya bangunan sekretariar RT dan RW	9 RW di Desa Limbangan Barat, Kab.Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberday aan Masyaraka tdan Desa	Dinas Pemberda yaan Masyaraka tdan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee3a8a516a4	24-01-2022	ADE PURKON	Kepala Desa Limbangan Barat	Sekretariat Daerah	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	kondisi rumah rusak parah	Kp. Lio Timur RT.01 RW.05 (Ai Siti Sopihat), Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Kabupaten/ Kota	Sekretaria t Daerah Kabupate n Garut	Sekretari at Daerah Kabupate n Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti harap dilengkapi dengan KTP+KK sudah berkeluarga, Belum memiliki rumah atau memiliki dengan kondisi Tidak Layak Huni, Penerima termasuk kategori MBR, belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee086a73078	24-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	PERBAIKAN LAPNG PASOPATI	Jalan pasopati desa limbangan tengah, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keteran gan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomend asi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee2eb2d67b8	24-01-2022	MULYA A	Kepala Desa	Kesehatan	Peningkatan volume pelatihan	PEREKONOMIAN	KP BURUJUL	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi

		SIDIK	Limbangan Tengah		keamanan pangan bagi UMKM		RW 001, Kab. Garut						Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Data Permohonan Ijin Industri Rumah Tangga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee615c0cb3d	24-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	PENGADAAN PERALATAN TENIS MEJA	KP BUNISARI RW04, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee6bb3e0e7f	24-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Sekretariat Daerah	Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan	PENGADAAN BARANG BARU	KP CIJAMBE RW 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap dilengkapi dengan proposal, Akte Pendirian, SK Kepengurusan, Ijin Operasional, Ijin

													Domisili, Izin Rekomendasi, NPWP an. Lembaga dan Nomor Rekening Bank an. Lembaga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee6f052c47d	24-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	BELUM TERSEDIA	KP RANDUKURUNG RW 009, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ef7873592e9	25-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Sekretariat Daerah	Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan	KURANG NYA FASILITAS SARANA PRASARANA KEAGAMAAN	SELURUH WILAYAH KAMPUNG DESA LIMBANGAN TENGAH, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap dilengkapi dengan proposal, Akte Pendirian, SK Kepengurusan, Ijin Operasional, Izin Domisili, Izin

													Rekomendasi, NPWP an. Lembaga dan Nomor Rekening Bank an. Lembaga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ef78ae279da	25-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Kecamatan	Dana Kelurahan Kecamatan Garut Kota (Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan)	KURANG LENGKAPNYA FASILITAS DI DESA	DESA LIMBANGAN TENGAH, Kab. Garut	BI. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan Balubur Limbangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan dan sesuai Ketentuan peruntukan dan pengelolaan Dana Kelurahan (Permendagri 130 tahun 2018) dan harap lengkapi dengan proposal dan pendukung lainnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ef7955b9f72	25-01-2022	MULYA SIDIK	Kepala Desa Limbangan Tengah	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	KURANG LAYAK	SDN LIMBANGAN TENGAH 1, SDN LIMBANGAN TENGAH 2, SDN LIMBANGAN TENGAH 3, Kab. Garut	BI. Limbangan	Limbangan Tengah	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee58b784bdb	24-01-2022	HERU GUNAWAN	Kepala Desa Limbangan Timur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Tidak Tersedia atau Kurang Penerangan Jalan Umum	RW 001 - RW 016, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee733ddefb0	24-01-2022	HERU GUNAWAN	Kepala Desa Limbangan Timur	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	SOR Desa Limbangan Timur yang sudah berumur dan kondisinya sudah waktunya untuk dilakukan rehabilitasi gedung olahraga, rehab ini memerlukan biaya 300.000.000 (tigaratus juta rupiah)	jl veteran no 114, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee7be9ee9af	24-01-2022	HERU GUNAWAN	Kepala Desa Limbangan Timur	Pariwisata	Desa Wisata (Aksesjalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Wilayah Desa Limbangan Timur terletak di di kabupaten garut di lewati oleh sungai sungai,dan Sangat Berpotensi untuk menjadi desa wiasata,diantarannya wisata dibidang wisata Arung Jeram, untuk itu pemerintah desa kami mengajukan bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang terciptanya desa wisata arung jeram.	Kp Cinangsi RW 16 Desa Limbangan Timur Kec. Bl. Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rekomendasi : Lengkapi Proposal (Rumusan Permasalahan), SK Yayasan Atau Organisasi serta SK Desa Wisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Rincian Anggaran Biaya nya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee9dd203b2b	24-01-2022	HERU GUNAWAN	Kepala Desa Limbangan Timur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kondisi Jalan Desa Sangat Rusak Dan Berlubang dan Sangat Membahayakan Pengguna Jalan	Kp Ciputat RW 006 Desa Limbangan Timur Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien :0 0 Anggaran : 0
61e4ea7452391	17-01-	ACENG	Kepala	Kepemudaan	Pengadaan	SARANA DAN	DESA	Bl.	Neglasari	Kabupaten/	Dinas	Dinas	Rekomendasi :

	2022	ALIMIN	Desa Neglasari	dan Olahraga	Sarana Olahraga Lainnya (Kaos, Matras, Sandsack, Barbel)	PRASARANA OLAHRGA	NEGLASARI, Kab. Garut	Limbangan		Kota	Pemuda dan Olah Raga	Pemuda dan Olah Raga	Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal Kegiatan 2. rekomendasi Kecamatan 3. Keterangan binaan induk Cabor (bila ada) Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e640df57592	18-01-2022	ACENG ALIMIN	Kepala Desa Neglasari	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Jalan TPT nya kondisinya rusak	Kp. Rancaciung Rt.03/Rw.10 Desa Neglasari Kec Bl.Limbangan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Neglasari	Kabupaten/ Kota	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Rekomendasi : gar melengkapi dokumen pendukung berupa 1) surat usulan 2) proposal (rumusan masalah, data lahan pertanian yg menjadi daerah layanan, alamat dna koordinat lokasi, foto lokasi, RAB) 3) surat kesediaan lahan 4) surat kesiapan pengelolaan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8e161158eb	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Pemukaran RT 01,02 RW 08 Dusun Pangeureunan	Kp. Pangeureunan RT 01,02 RW, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan

													kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8e46b64cd4	20-01- 2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureu nan	Kecamatan	Dana Kelurahan Kecamatan Garut Kota (Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)	Pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD)	Kp. Margamukti RT 01 RW 06, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureun an	Kabupaten/ Kota	Kecamata n Garut Kota	Kecamata n Garut Kota	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan dan sesuai Ketentuan peruntukan dan pengelolaan Dana Kelurahan (Permendagri 130 tahun 2018) Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8e626d047f	20-01- 2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureu nan	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	Rehabilitasi Gedung PAUD Dusun I-V	Dusun Cihanjuang, Dusun Nagrak,Dus un Margamukti ,Dusun Pangeureun an, dan Dusun Kubang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureun an	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Penganta r / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Fot o Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61e8e71d8a7ec	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - PAUD	Renovasi sarana PAUD RT 01 dan RT 05 RW 02	Kp. Cihanjuang RT 01 dan dan Kp. Sukajadi RT 05 RW 02, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8ecc1ea11c	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pendidikan	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Pembangunan MCK RW 01	Kp. Cinangor RW 01, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61e8effbd4bde	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban -PNF/Kesetaraan	Pembangunan MCK	Kp. Kubang RW 09, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8f619c5d15	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Pembangunan Kantor RW 01-10	RW 01-10, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8f68539c83	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Pembangunan Gapura dan Batas RW	RW 01-10, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan

													penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e917dbab70a	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Melaksanakan edukasi pada masyarakat terampil dalam upaya pencegahan dini bahaya kebakaran ditingkat Masyarakat, Pemerintahan lembaga/perusahaan	Penyuluhan Larangan Merusak Hutan	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi dengan proposal yg data nya lengkap agar lokasi bisa diakomodir dinas terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91a870f1c0	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Pembangunan Pos Kamling RW 04	RW 04 Dusun Nagrak, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91ae062ec5	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Pembangunan Pos Kamling Kp. Bunikasih	Kp. Bunikasih RT 04 RW 03 Dusun Nagrak, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan

													kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91dd64988a	20-01- 2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureu nan	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa Pangeureun an, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureun an	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Dinas Pemu da dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keteran gan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomen dasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91e52c0e92	20-01- 2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureu nan	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Lapangan Olahraga Margamukti	Kp. Margamukti RW 06 Dusun Margamukti , Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureun an	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Dinas Pemu da dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keteran gan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomen

													dasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91ec0625f5	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Lapangan Voli Nangkajajar	Kp. Nangkajajar RT 01 RW 04 Dusun Nagrak, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi dasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e91f22dbea2	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan Kelengkapan Olahraga Ciangor	Kp. Ciangor RW 01 Dusun Cihanjuang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa

													4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomen dasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e992debd9a6	20-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Bantuan Modal Ternak Kelompok Pemuda	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten /Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9952eee93d	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pertanian	bantuan prasarana pendukung usaha peternakan (Jalan usaha tani)	Pengadaan Pupuk Subsidi dan Obat-Obatan	Kp. Kubang RW 09 Dusun Kubang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten /Kota	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan	Rekomendasi : Lengkapi 1) surat usulan 2) proposal (permasalahan, alamat dna koordinat lokasi, foto lokasi, volume (p x l xt) RAB) 3) surat kesediaan lahan 4) surat kesiapan pengelolaan Koefisien :0 0 Anggaran : 0
61e995a36f10d	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Kp. Kubang RW 09 Dusun Kubang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten /Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61e996116069c	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Kp. Babakan Nagrak RT 02 RW 03 Dusun Nagrak, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e9966d4edaa	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Penyuluhan Pertanian Dusun Margamukti	Kp. Margamukti RW 06 Dusun Margamukti, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi data dalam proposal agar bisa diakomodir Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e997b624d23	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi data dalam proposal agar bisa diakomodir Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e998a128669	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pada Kelompok Pertanian	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e998fde57bd	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Penyuluhan Teknik Pemeliharaan Pertanian dan Peternakan	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi data dalam proposal agar bisa diakomodir Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61e99968c6359	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Pelatihan Pemanfaatan Biogas	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi data dalam proposal agar bisa diakomodir Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e99a65033b1	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Penyuluhan Kader Posyandu Dusun Margamukti	Kp. Margamukti RW 06 Dusun Margamukti, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Rekomendasi : lengkapi data dalam proposal agar bisa diakomodir Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e99ac03446b	21-01-2022	ASEP SURYAT NA	Kepala Desa Pangeureunan	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Pengadaan Velbet di Tiap Posyandu/RW	Desa Pangeureunan, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pangeureunan	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e0e575dd5b7	14-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jalan Penghubung antara Kp Cicadas Dan Cibadak 2 menjadi Vital karena jalan utama penghubung antara kp cibadak dan cicadas, Jalan ini selaulicin ketika hujan karena sebgian masih tanah	KP CICADAS RT 02 RW 08, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi.

													Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e0fc467fca9	14-01- 2022	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Jalan ini adalah jalan utama bagi warga masyarakat di kp cisalak yang belum terkena aspal atau tembok samsekali	kp cisalak rt 02 rw 09, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e0fd451e824	14-01- 2022	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	ketika hujan licin karen ajalan masih kebnayakan tanah	kp pasirastana rt 01 rw 01, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap,

													tidak ada Kelengkapan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e0fe4a0546d	14-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pariwisata	Desa Wisata (Aksesjalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Jalan ini digunakan untuk akses pertanian warga dan pariwisata, tetapi masih belum masuk standar dan rusak	kp cibadak 2 rt 01 rw 07, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Tidak tercantum nama desa wisata yang akan dihubungkan aksesnya, begitu pula lahan pertanian yang akan dilayani. sehingga lebih cocok untuk diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61e10a3ea75de	14-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi/Peningkat an Lapangan Sepak Bola Desa	Belum memadainya sarana dan prasarana lapang sepakbola di desa pasirwaru	Kp Ikar rt 03 rw 03, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. rekomendasi Kecamatan 2. Surat Keterangan ketersediaan lahan (Kalau Baru) 3. Keterangan tanah bebas sengketa 4. Foto terakhir / kondisi faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e10b1a405aa	14-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan JalanLingkungan untuk Cegah Kumuh	Poros pojok cipicung Belum tersentuh oleh pembangunan apapun dan kondisinya jelek menghubungkan 2 desa	Kp Pojok rt 04 rw 05, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan

													berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e7fe5495217	19-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	belum kantor rw	kp serut RT 01 RW 011, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten /Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap dilengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e7ff8a774bd	19-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pertanian	Jalan Usaha Tani	jalan meamdai tapi belum di beton licin bila hujan	jalan produksi blok pasir kolecer sampai cipicung, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten /Kota	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Rekomendasi : Agar melengkapi dokumen pendukung berupa 1) surat usulan 2) proposal (rumusan masalah, data lahan pertanian yg menjadi daerah layanan, alamat dna koordinat lokasi, foto lokasi, RAB) 3) surat kesediaan lahan 4) surat kesiapan pengelolaan Koefisien : 0 0

													Anggaran : 0
61e80ba3eb6b8	19-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	air sering meluap karena drainasenya dangkal	Kp Cibadak2 Rw 07, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e80c8b3b583	19-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tanah yang labil membuat saluran menjandi dangkal	Kp Cisalak Rw 12, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk

													selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e80dc7d4203	19-01-2022	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tanah Labil	Kp Citamiang Rw 09, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e8100ee873f	19-01-	YONI NUGRAHA, M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Peningkatan Debit air TPT Kurang tinggi	Kp Ikar Rw 03, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan, Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya

													dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e810cc47156	19-01-	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tanah Longsor	Kp Pasirastana Rw 10, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Pasirwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Berdasarkan informasi dari foto dan proposal, usulan diteruskan ke Dinas Perumahan dan Permukiman. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai kebutuhan panjang jalan yg perlu dibangun berdasarkan lokasi prioritas Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e822f63aaca	19-01-	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Sekretariat Daerah	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Bangunan Tidak Layak Huni	Desa Pasirwaru, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Pasirwaru	Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Prop. di lengkapi Ktp WNI & sdh berkeluarga, blm punya rumah, KK sesuai dgn domisili tetap, SK domisili Tetap dr Kel/Desa setempat,

													Penerima kategori Masy pnghasilan rendah, Penrima blm pernah dpat bantuan perbaikan rumah dr prog lain, foto kondisi rumah Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61eb624e1ee2c	22-01-	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Madrasah	kurang memadai	kp mariuk RT 02 ew 04, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diteruskan karena Proposal dan Foto Lengkap, kelengkapan sesuai dengan usulan,Usulan sesuai tupoksi. Untuk selanjutnya dikaji rekomendasi anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lokasi prioritas, bukan dana hibah, namun pembangunan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61eb6d707acb6	22-01-	YONI NUGRAHA , M.Ag	Kepala Desa Pasirwaru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	BELUM PUNYA MASIH NUMPANG DI RUMAH WARGA	KP MARIUK RW 04, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Pasirwaru	Kabupat en/Kota	Dinas Pemberda yaan Masyarak atdan Desa	Dinas Pembe rday aan Masyar akat dan Desa	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumentasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan kesediaan penggunaan lahan dari pemilik Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee2f3570139	24-01-	WAWAN SUHERMA N	Kepala Desa Simpn Kaler	Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Perlunya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Tani	Kp. Cipari Wetan, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupat en/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigras i	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigras i	Rekomendasi : Permasalahan usulan tidak sesuai dengan program SKPD Dinas Tenaga Kerja Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee33bbefdd3	24-01-	WAWAN SUHERMA N	Kepala Desa Simpn Kaler	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan	Kurangnya Air Bersih ke pemukiman dan Lahan Pertanian di Dusun Satu	Kp. Talaga, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupat en/Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil Kec. Setempat 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pe ngantar /

													analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee36b9d65f6	24-01-	WAWAN SUHERMA N	Kepala Desa Simpn Kaler	Pendidikan	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Kurangnya Sarana Sanitasi lingkungan Warga di Dusun Dua	Kp. Simpen, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupat en/Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. Pe ngantar / analisis UPT PUPR Setempat 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee37a4e2794	24-01-	WAWAN SUHERMA N	Kepala Desa Simpn Kaler	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP	Perlunya Pemagaran Halaman Sekolah SMP Negeri 4 Limbangan	Kp. Singkur, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupat en/Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pe ngantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0

													Anggaran : 0
61ee38298b6d2	24-01-	WAWAN SUHERMAN	Kepala Desa Simpn Kaler	Pendidikan	Pemagaran HalamanSekolah - SD	Perlunya Pemagaran Sekolah Di SDN Simpn III	Kp. Simpen RW.05, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupate n/Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidik an	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. P engantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee38cd2b54e	24-01-	WAWAN SUHERMAN	Kepala Desa Simpn Kaler	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	Perlunya tambahan Insentif Guru Ngaji	Kp. Cicadas, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpn Kaler	Kabupate n/Kota	Sekretar iat Daerah Kabupat enGarut	Sekret ariat Daerah Kabupa ten Garut	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan, harap di lengkapi dengan proposal, foto dokumentasi serta daftar nama usulan guru ngaji yang terdaftar di FKDT Kab.garut

													Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee3ab472e2a	24-01-	WAWAN SUHERMAN	Kepala Desa Simpén Kaler	Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Pelatihan Pemuda Olah Raga di Kedusunan Satu	Kedusunan Satu Desa Simpén Kaler, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kaler	Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rekomendasi : Permasalahan usulan tidak sesuai dengan program SKPD Dinas Tenaga Kerja Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee355b61c54	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Kecamatan	Dana Kelurahan Kecamatan Garut Kota (Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan)	KARENA KONDISI AULA SUDAH LAYAK DIREHABILITASI	KANTOR DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kidul	Kabupaten/Kota	Kecamatan Balubur Limbangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan dan sesuai Ketentuan peruntukan dan pengelolaan Dana Kelurahan (Permendagri 130 tahun 2018) harap lengkapi dengan proposal dan diajukan ke provinsi Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee37e8d4bad	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte kelahiran, surat nikah dan	KARENA BELUM MAKSIMALNYA KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Rekomendasi : Harus ada Surat rekomendasi dari Desa, Kartu Keluarga dan data Keluarga

					Kartu Induk Anak								Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee3ed58ac3d	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban -SD	SUPAYA TERCIPTANYA LINGKUNGAN SEKOLAH YANG SEHAT DAN BERSIH	KP BARU,SUKA MANAH DAN CIBITUNG, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupat en/Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. P engantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0Anggaran : 0
61ee3f524c618	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Pemagaran HalamanSekolah - SD	KARENA SEKOLAH YANG DIAJUKAN TERSEBUT BELUM MEMILIKI PAGAR HALAMAN YANG MEMADAI	KP BARU ,SUKAMANA H DAN CIBITUNG, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupat en/Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. P engantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0

													0 Anggaran : 0
61ee401045415	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	KARENA SUDAH PERLU ADANYA REHAB TERHADAP RUAN KELAS SD SUPAYA PARA SISIWA MERASA NYAMAN DLAM BELAJAR	KP SUKSMANA H, BARU DAN CIBITUNG, Kab. Garut	BI. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee409062080	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Perpustakaan	Sarana Prasarana Perpustakaan	BELUM ADANYA PERPUSTAKAAN YANG MEMADAI	DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	BI. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Rekomendasi Kecamatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee485c998e0	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Kesehatan	Peningkatan volume pelatihan keamanan pangan bagi UMKM	UNTUK MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA PARA PELAKU UMKM	DESA SIMPOEN KIDUL, Kab. Garut	BI. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. D ata

													Permohonan Ijin Industri Rumah Tangga Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee4dffeeb6c	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Kecamatan	Dana Kelurahan Kecamatan Garut Kota (Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan)	KONDISI BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIAJUKAN KEDAANNYA SUDAH TIDAK MEMADAI	KANTOR DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Kecamatan Balubur Limbangan	Kecamatan Balubur Limbangan	Rekomendasi : Untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh SKPD jika telah memenuhi persyaratan dan sesuai Ketentuan peruntukan dan pengelolaan Dana Kelurahan (Permendagri 130 tahun 2018) harap lengkapi dengan proposal, foto dan pendukung lainnya serta ajukan ke provinsi Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee4ef31bf5b	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Kepemudaan dan Olahraga	Hibah sarana dan prasarana olahraga	BELUM ADANYA PRASARANA YANG BERUPA LAPANGAN BOLA	DUSUN 1, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Kecamatan 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan/Keterangan Bebas Sengketa 4. Foto Kondisi Faktual 5. rekomendasi induk cabor setempat bila ada Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee51097917d	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Sekretariat Daerah	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	KARENA MASIH TERDAPAT BANYAK RUMAH KUMUH	DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Rekomendasi : Prop. di lengkapi Ktp WNI & sdh berkeluarga, blm punya rumah, KK sesuai dgn domisili tetap, SK domisili Tetap dr Kel/Desa

													setempat, Penerima kategori Masy pnghasilan rendah, Penrima blm pernah dpat bantuan perbaikan rumah dr prog lain, foto kondisi rumah Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee5188bde30	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan	DIKARENAKAN DI DESA SIMPEN KIDUL MASIH BANYAK MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN AIR BERSIH	DESA SIMPEN KIDUL, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kidul	Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi i Korwil Kec. Setempat 3. Surat Keterangan ketersediaan lahan 4. P engantar / analisis UPT PUPR Setempat t 5. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran :

													0
61ee5cb69f62e	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP	KARENA RUANG KELAS YANG ADA SUDAH TERDAPAT BEBERAPA KERUSAKAN	KP CIBITUNG RW 05, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpen Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. Pen gantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee603db440b	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	RUANG KELAS YANG ADA SUDAH TERDAPAT BEBERAPA KERUSAKAN	KP BARU RT RW 02, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpen Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. Pen gantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee609894b3e	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	USIA BANGUNAN SEKOLQAH SUDAH CUKUP TUA SEHINGGA PERLU DIADAKAN REHABILITAS	KP CIBITUNG RT 01 RW 05, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. Pen gantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee61033414a	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	PERLUNYA DIADAKAN REHABILITAS GEDUNG SEKOLAH AGAR PARA SISIWA MERASA NYAMAN DALAM BELAJAR	KP SUKAMANA RT 03 RW 11, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. Pen gantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee617731786	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	BANGUNAN YANG ADA SUDAH TERDAPAT BEBERAPAKERUSAKAN	KP LEBAK CANDRA RT 01 RW 14, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidi kan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. Pen

													gantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamat an	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tuju an Awal	SKPD Tuj uan Akh ir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)
61ee61d3d330a	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simp en Kidul	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - SD	BELUM MEMILIKI PAGAR HALAMANYANG MEMADAI	KP BARU RT 01 RW 2, Kab. Garut	Bl. Limbanga n	Simp en Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidik an	Dinas Pendid ikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomenda si Korwil 3. P enganta r / analisis UPT PUPR Setemp at 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0Anggaran : 0

61ee6282514f7	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - SD	BELUM MEMILIKI PAGAR HALAMANYANG BAIK	KP SUKAMANA H RT 03 RW 11, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kidul	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee62be48469	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - SD	HALAMAN SEKOLAH YANG ADA BELUM MEMILIKI PAGAR YANG LAYAK	KP CIBITUNG RT 01 RW 05, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpén Kidul	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / analisis UPT PUPR Setempat 4. Foto Kondisi Faktual Koefisien : 0

													0 Anggaran : 0
61ee634473972	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	RUANG KELAS YANG ADA SUDAH TERDAPAT BEBERAPA KERUSAKAN SEHINGGGA PERLU DIADAKAN REHABILIATS RUANG KELAS	KP BARU RT 02 RW 01, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61ee63a6cb5f0	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	RUANG KELAS YANG ADA SUDAH TERDAPAT KERUSAKAN KERUSAKAN SEHINGGA PARA SISWA MERASA KURANG NYAMAN	KP SAAR RT 01 RW 03, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

61ee63f3c6081	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	SUDAH LAYAK DIADAKAN REHABILITAS TERHADAP PAUD TERSEBUT	KP CIBITUNG RT 01 RW 05, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomen dasi : Lengkapi Persyarat an Berikut : 1. Propo sal 2. rekome ndasi Korwil 3. P enganta r / Keteran gan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisi en : 0 0 Anggaran : 0
61ee644706295	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	BANGUNAN YANG DIAJUKAN TERSEBUT USIANYA SUDAH CUKUP TUA SEHINGGA SUDAH TERDAPAT BEBERAPA KERUSAKAN	KP PONGPORA NG RT 01 RW 09, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomen dasi : Lengkapi Persyarat an Berikut : 1. Propo sal 2. rekome ndasi Korwil 3. P

													enganta r / Keteran gan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisi en : 0 0 Anggaran : 0
61ee64a6e4c77	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpén Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	BANGUNAN SUDAH CUKUP TUA SEHINGGA PERLU DIADAKAN REHABILITAS TERHADAP BANGUNAN PAUD TERSEBUT	KP LEBAK CANDRA RT 01 RW 14, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Simpén Kidul	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomen dasi : Lengkapi Persyarat an Berikut : 1. Propos al 2. rekome ndasi Korwil 3. P enganta r / Keteran gan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisi en : 0 0 Anggaran

61ee651e243be	24-01-	KOSIM	Kepala Desa Simpen Kidul	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD	MASIH SEDIKITNYA BANGUNAN YANG ADA MAKA PERLU DIBANGUNNYA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	KP SUKAMANA RT 02 RW10, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Simpen Kidul	Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	: 0 Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. rekomendasi Korwil 3. Pengantar / Keterangan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e198e4e05e9	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan LPM, RT,RW	untuk meningkatkan kinerja lpm,rt,rw	Desa Surabaya, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Proposal dilengkapi dengan SK Kepengurusan LPM, RT, RW

													Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e199a4f3839	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Insentif Dasawisma	kader dasawisma belum mendapatkan insentif	Desa Surabaya, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Proposal, NPWP, SK Dasawisma Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e19b31ec9a3	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	Belum mempunyai bangunan posyandu	RW 03 DAN RW 04, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rekomendasi : Usulan dikembalikan karena tidak ada di Kamus Usulan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e19c109a53b	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kesehatan	Pembangunan Pustu	pustu belum pernah di rehab	Kp Surabaya RT 01/RW 01, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : 1. wilayah kerja minimal 1 desa

													2. lokasi jauh dari Puskes mas 3. t ersedi a tanah milik pemer intah/ sertifi kat kepe milika n tanah 4. P ropos al dilen gkapi deng an DED Koefi sien : 0 0 Angg aran : 0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

61e19cbdd5ae9	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kampung Ramah Anak (Kampung)	Bahwa anak harus di bimbing dan di bina supaya tidak terpengaruh oleh hal negatif	Dusun I,Dusun II,Dusun III, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pengend alian Pendudu k, Keluarga Berencana, Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun ga n Anak	Dinas Penge ndalia n Penduk, Keluarg Berenc ana, Pembe rdayan aan Perem puan dan Perlind unga n Anak	Rekomen dasi : Kampung yang belum Memenuh i : 24 Indikator Kabupate n/Kota Layak Anak Koefisie n : 0 0 Anggara n : 0
61e19d8645b50	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pendidikan	Pengadaan APE dalam - PAUD	Peralatan APE PAUD belum lengkap	Paud Hidayatussa hidin Kp Gombong RT 03/RW 08, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomen dasi : Lengkap syarat berikut : 1. Propos al 2. rekome ndasi Korwil 3. F oto Kondisi Faktual Koefisie n : 0 0

													Anggaran : 0
61e19e323484c	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Peralatan kesehatan posyandu belum lengkap	Posyandu RW 01 s/d Posyandu RW 09, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rekomendasi : Lengkapi Persyaratan Berikut : 1. Proposal 2. Profil Pposyandu 3. Dikoordinasi oleh Puskesmas Koefisien : 00 An

													gg ar an : 0
61e1a02409210	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	sangat dibutuhkan untuk kenyamanan dan keamanan belajar	SDN Surabaya 1 ,SDN Surabaya 2 dan SDN Surabaya 3, Kab. Garut	BI. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendidika n	Rekomen dasi : Lengkapi Persyarat an Berikut : 1. Propos al 2. rekome ndasi Korwil 3. P enganta r / Keteran gan analisis dari UPT PUPR 4. Foto Faktual Koefisi en : 0 0 Anggaran : 0

61e1ab886027c	14-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Paguron	Paguron belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai	Sinar balebat pusaka mandiri kp Gombong, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Dina s Pem uda dan Olah Rag a	Rekomen dasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Propos al 2. rekome ndasi Kecam atan 3. S ura t Ket era nga n lah an Beb as sen gke ta 4. P eng ant ar dari Cab or Wil aya h
---------------	--------	--------------	-------------------------	----------------------------	------------------	---	--	------------------	----------	------------------------	---	--	--

													set em pat 5. F oto Kondisi Faktual Koefisie n : 0 0 Anggara n : 0
61e5a3dc69112	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapang Volly	lapang voly belum diperbaiki	RW 02 DAN RW 09, Kab. Garut	BI. Limbang an	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Dina s Pem uda dan Olah Rag a	Rekomen dasi : Lengkapi syarat berikut : 1. Propos al 2. rekome ndasi Kecam atan 3. Surat Ketera ngan keterse diaan lahan 4. P eng ant ar dari Cab or

													Wil aya h set em pat 5. F oto Kondisi Faktual Koefisie n : 0 0 Anggara n : 0
61e5a4afce81c	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	KETUA RT/RW BELUM MEMILIKI GEDUNG/BANGUNAN	RW 01 S/D RW 09, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	Dinas Pembe rday aan Masya rakat dan Desa	Rekomen dasi : Untuk dikaji dan ditindakl anjuti, proposal harap di lengkapi dengan dokumen tasi, surat keterangan hibah tanah/ surat keterangan an

													kesediaa n penggun aan lahan dari pemilik Koefisie n : 0 0 Anggaran : 0
61e620abe9993	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Alat Tenis Meja	di tiap RW Tidak memiliki Peralatan tenis meja	RW 01 S/D RW 09, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Dina s Pem uda dan Olah Rag a	Rekomen dasi : Lengkapi Persyarat an Berikut : 1. Propos al Kegiat an 2. rekome ndasi Kecam atan 3. K eteranga n binaan induk Cabor (bila ada) Koefisie n : 0 0 Anggara n : 0

61e6288de0a20	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset DII)	untuk mendukung produksi apabila listrik padam	karya tani III Gombang, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa	Dinas Pemb erday aan Masy araka t dan Desa	Rekomenda si : Untuk dikaji dan ditindaklanj uti oleh SKPD jika telah memenuhi persyarata n Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e62aa9eccdd	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - SD	UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH	SDN SURABAYA 1,SDN SURABAYA 2,SDN SURABAYA 3, Kab.Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pendidika n	Dinas Pendid ikan	Rekomenda si : Lengkapi syarat berikut : 1. Proposal 2. rekomen dasi Korwil Kec. Setempa t 3. Surat Keterang an ketersed iaan lahan 4. P enga ntar / anali sis

													UPT PUPR Sete mpat 5. F oto Kondisi Faktual Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e631517830e	18-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan/Bant u an Modal Usaha Pemuda Produktif	Kelompok pemuda membutuhkan tambahan modal usaha	Desa Surabaya, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pemud a dan Olah Raga	Din as Pe mu da dan Ola h Rag a	Rekomenda si : Lengkapi Persyarata nBerikut : 1. Proposal Kegiatan 2. re komendas i Kecamata n Koefisien :0 0 Anggaran : 0
61e7845d1f489	19-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Saluran air rusak mengakibatkan areal sawah sering kekurangan air	Irigasi nyalindung, Kab. Garut	Bl. Limbang an	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Pertani an	Dina s Pert ania n	Rekomenda si : Agar melengkapi dokumen pendukung berupa 1) surat

													usulan 2) proposal (rumusan masalah, data lahan pertanian yg menjadi daerah layanan, alamat dna koordinat lokasi, volume (p x l x t), RAB) 3) surat kesediaan lahan 4) surat kesiapan pengelolaa n Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61e7ccde7f292	19-01-	ASEP RONI	Kepala Desa Surabaya	Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Dusun I,Dusun II dan Dusun III, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Surabaya	Kabupa ten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig rasi	Dinas Tenag a Kerja Dan Trans migra si	Rekomend asi : Harus diverifikasi terlebih dahulu, apakah desa tersebut layak mendapatk

													an bantuan PKS-PK. Diprioritas kan desa yang belum pernah mendapatk an bantuan PKS-PK dan desa dengan tk. kemiskinan serta penganggu ran tinggi dan merupakan desa lokasi fokus stunting Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(Sumber data PengelolaPeencanaan Kecamatan)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahana Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahana Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta

4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Balubur Limbangan mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	78
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	75

(Sumber Data Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Balubur Limbangan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan

yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Balubur Limbangan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Balubur Limbangan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Balubur Limbangan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Balubur Limbangan diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Balubur Limbangan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.

Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan.

Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Balubur Limbangan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Balubur Limbangan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Balubur Limbangan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b.Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1.Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

2.Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Balubur Limbangan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Balubur Limbangan dan mencakup semua Desa.

3.Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.901.234.000,-

Adapun Program Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balubur Limbangan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 1.3.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dum Truk)
- 1.4.2 Pengadaan Mebel
- 1.4.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- 3.3.1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 3.3. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- 3.3.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4.1.2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel.3.2 berikut ini :

Tabel .3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balubur Limbangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluara nSub Kegiata n	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	0				KECAMATAN							3,901,234,000			4,277,502,810			
7	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,762,899,600			3,112,563,730			
7	0	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,517,800			16,500,000			
7	0	01	2.0	01	Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka tDaerah	Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin	Jumla h Dokum en Perenc anaan Perang	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan , Penggangan an, dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	1 Laporan	16,517,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentas e pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan	100 %	16,500,000

						tahan ditingka t kecama tan	kat Daerah	Perangkat Daerah								ditingkat kecamata n		
7	0 1	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,714,476,885						1,886,325,320
7	0 1	01	2.0 2	01	Penye diaan Gaji dan Tunjan gan ASN	Prosent ase Pemenu han urusan penunja ng Pemerin tahan ditingka t kecama tan	Jumlah Pembay aran Gajidan Tunjan gan ASN	Jumlah Pelaksana an Administra si Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	12 bulan	1,704,018,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemenuh an urusan penunjan g Pemerint ahan ditingkat kecamat an	100 %	1,875,325,320
7	0 1	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosent ase Pemenu han urusan penunja ng Pemerin	Jumlah Laporan Keuanga nAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Pelaksana an Administra si Keuangan Perangkat	Kab. Garut, Bl. Limbanga n, Limbanga n Timur	100 %	1 Dokumen	12 bulan	10,458,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemenuh an urusan penunjan g Pemerint ahan ditingkat	100 %	11,000,000

						tahan ditingka t kecama tan	Koordina si Penyusun an Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Daerah								kecamatan		
7	0	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							77,638,500						82,500,000
7	0	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin tahan ditingka t kecama tan	Juml ah Pake t Paka ian Dina s bese rta Atrib ut Kele ngka pan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbanga n, Limbanga n Timur	100 %	1 Paket	100 %	62,638,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan ditingkat kecamata n	100 %	66,000,000
					Pendidikan	Prosent	Jumlah	Jumlah	Kab.					Dana		Prosentase		

7	01	01	2.05	09	dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100 %	3 Orang	100 %	15,000,000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	16,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								128,094,850				124,083,410	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Jenis	100 %	7,701,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	6,331,930

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Kegiatan	100 %	28,671,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	16,844,300
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Jenis	100 %	4,944,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	14,300,000

7	0	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang sediakan	Jumlah Pelaksanaan Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	12,913,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	9,689,900
7	0	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang sediakan	Jumlah Pelaksanaan Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	7,317,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	6,558,200

7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	19,505,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	18,150,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	47,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	52,209,080
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								605,381,700				750,650,000	

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 unit	100 %	38,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	38,500,000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2 Unit	100 %	74,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	90,750,000

7	0	01	2.0	05	Pengadaan Mebel	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	4 Jenis	100 %	29,286,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	55,000,000
7	0	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Paket	100 %	88,118,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	153,900,000

7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Gedung	100 %	375,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	412,500,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29,649,865					46,200,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Pembayaran Rekening Tagihan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	14,999,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	16,500,000

70103	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5 Jenis	100 %	2,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	16,500,000
70104	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Jenis	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	13,200,000
70109	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191,140,000	206,305,000				

7	0	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 0 100 %	1 Unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	0 0 100 %	3,300,000
---	---	----	-----	----	---	--	--	--	--	--------------	--------	-------	-----------	--	--	--------------	-----------

7	0	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin tahan ditingka t kecama tan Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin tahan ditingka t kecama tan	Jumla h Pemel iharaa n Kend araan Dinas Opera sional Lapan gan sesua i kebut uhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		0 0 100 %	8 Unit	100 %	27,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentas e pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan ditingkat kecamata n Prosentas e pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan ditingkat kecamata n	0 0 100 %	27,280,000
---	---	----	-----	----	--	---	--	---	--	----------------------	---------------	--------------	-------------------	---	---	----------------------	-------------------

7	0	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin tahan ditingka t kecama tan Prosent ase pemenu han urusan Penunja ng pemerin tahan ditingka t kecama tan	Jumlah Pemelih araan Alat Besar sesuai Kebutuh an	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		0 0 100 %	1 Unit	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentas e pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan ditingkat kecamata n Prosentas e pemenuh an urusan Penunjan g pemerint ahan ditingkat kecamata n	0 0 100 %	10,725,000
---	---	----	-----	----	--	--	--	--	--	--------------	--------	-------	------------	--	--	--------------	------------

7	0	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 0 100 %	1 Gedung	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	0 0 100 %	165,000,000
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								549,536,000				556,133,600	
7	0	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								319,230,000				319,000,000	

7	0	02	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	1 Dokumen	1 kali	91,082,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	209,000,000
7	0	02	2.0	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	1 Dokumen	1 kali	228,147,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100 %	110,000,000

							dilaksanak an oleh Kecamata n	tahan di Tingkat Kecama tan								dilaksana kan oleh Kecamat an		
7	0 1	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							215,991,200						221,375,000
7	0 1	02	2.0 2	01	Perencana an Kegiatan Pelayanan kepada Masyaraka t di Kecamata n	Prosen tase Fasilita si Penyel enggar aan Pemer intahan dan Pelaya nan Publik Yang dilaksa nakan Oleh Kecam atan	Jumlah Dokume n Perenca naan Kegiata n Pelayan an Kepada Masyara kat di Kecama tan	Jumlah Pelaksanaa n Penyelengg araan Urusan Pemerintaha n Yang Tidak Dilaksanaka n Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		100 %	1 Dokumen	1 kali	50,031,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Fasilitasi Penyelen ggaraan Pemerint ahan dan Pelayana n Publik Yang dilaksan akan Oleh Kecamat an	100 %	55,000,000

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		100 %	1 Laporan	1 kali	165,959,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	100 %	166,375,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								14,314,800				15,758,600	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan		100 %	1 Laporan	100 %	14,314,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100 %	15,758,600

					Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Masyarakat									Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								90,566,300					108,936,700	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								19,250,000					20,500,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberda	Persentase Masyarakat Desa dan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi		100 %	1 Laporan	1 kali	19,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan	100 %	20,500,000	

					yaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan yang dapat diberdayakan	tas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan desa								Kelurahan yang dapat diberdayakan		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								43,316,300					57,636,700
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Fatisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		100 %	8 LKM	100 %	43,316,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	57,636,700
7	0	03	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								28,000,000					30,800,000

	1		3															
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Masyarakat Desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Limbangan Sesuai kebutuhan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		100 %	5 Kegiatan	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Masyarakat Desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30,800,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								138,433,900					146,834,100
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								88,220,000					96,834,100
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Persentase Penanganan Gangguan Tranti	jumlah laporan hasil sinergitas	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan		100 %	12 Bulan	2 Laporan	88,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penangan	100 %	96,834,100

					Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bum	den gan kepolisia n negara republk indonesia ,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Peraturan Kepala Daerah										
7	0	04	7.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								50,213,900					50,000,000
7	0	04	7.0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Perse ntase Penan ganan Ganggu an Tranti bum	Jumlah Laporan Pelaksa naan Harmoni sasi Hubung an dengan Tkoh Agama dan Tokoh	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamata n		100 %	1 Laporan	78 BB	50,213,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Per sen tas e Pen ang ana n Gan ggu an Tra ntib	100 %	50,000,000

								Masyara kat								um		
7 1	0	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								246,241,000					270,632,780
7 1	0	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								246,241,000					270,632,780
7 1	0	05	2.0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksana	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100 %	25 orang	100 %	21,059,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Prosentase Penyelenggaraan	100 %	23,132,780

					dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Umum Tingkat Kecamatan	naan undang Undang dasar negara Republik Indonesi atahun 1945 pelestari an bhineka Tunggal Ika serta pemertahan an dan pemeliha raan keutuhan negaran kesauan republik indonesia								n Tugas Pemerin tah Umum Tingkat Kecama tan		
7	0	05	2.0	02	Fasilitasi, Koordinas i dan Pembinaa n (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persentas e Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum yang	Ju mla h Ora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggar aan Urusan		100 % 0 %	2 Orang	100 %	24,999,800	Dana Transfer Umum-Dana	Persent ase Penyele nggaraa n Urusan Pemerin	100 %	27,500,000

					Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional	dilimpahka n Kepada Camat Prosentas e Penyeleng garaan Tugas Pemerinta h Umum Tingkat Kecamata n	ng yan g me ngi kuti Fas ilita si Koordinasi dan Pembinaa n (Bimtek,So sialisasi,K onsultasi) Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional	Pemerintaha n Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat							Alokasi Umum		tahan Umum yang dilimpa hkan Kepada Camat Prosent ase Penyele nggaraa n Tugas Pemerin tah Umum Tingkat Kecama tan		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100 %	1 Tahun	100 %	200,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	220,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								113,557,200			82,401,900	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								113,557,200			82,401,900	

7	0	06	2.0	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	4 Dokumen	100 %	38,872,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	43,901,900
7	0	06	2.0	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	1 Dokumen	100 %	54,390,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,500,000

7	0	06	2.0	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan PembangunanPartisipatif	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Faslitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisitif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	1 Dokumen	100 %	20,294,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	22,000,000
TOTAL													3,901,234,000					4,277,502,810

(Sumber Pengelola Kecamatan Balubur Limbangan)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut sebesar Rp. 3.901.234.000,- (Terbilang Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 2,762,899,600,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 16,517,800,-
Keluaran	: 1. Jumlah dokumen Perencanaan 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

2. Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1,704,018,085 ,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 77,638,500,-
Keluaran	: 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 128,094,850 ,-
Keluaran	: 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan 2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan 3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan 4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan 5. Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa 6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan 7. Jumlah Dokumen Penataan Arsip Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 605,381,700 ,-
Keluaran	: 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 2. Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan 3. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan 4. Jumlah Peralatan Mesin Lainnya 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.29,649,865,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 191,140,000 ,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 549,536,000 , -
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.
- Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 80 (Baik)
- Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 319,230,000 , -
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.
- Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 80 (Baik)
- Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada DIkecamatan

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

	Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 215,991,200,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.
Hasil	: Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 80 (Baik)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Capaian Program	: Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 90,566,300,-
Keluaran	: 1. Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang. 2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 19,250,000,-
Keluaran	: Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

2. Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan

Capaian Program	: Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 43,316,300 ,-
Keluaran	: Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program	: Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 28,000,000 ,-
Keluaran	: Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Capaian Program	: Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 138,433,900 ,-
Keluaran	: 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 50,213,900 ,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 88,220,000,-
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 246,241,000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. . 246,241,000 ,-
Keluaran	: 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 113,557,200 ,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 113,557,200 -

Keluaran	: 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipati
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Balubur Limbangan

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 3.901.234.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Kadungota. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil. Penyusunan Renja Kecamatan Balubur Limbangan mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Balubur Limbangan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Balubur Limbangan akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN